

Sambut Baik Pansus Aset

PONTIANAK. Keinginan DPRD Kalbar mengatasi persoalan aset melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) disambut baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Hal itu sejalan dengan keinginan gubernur untuk penataan aset menjadi lebih baik.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalbar, Christianus Lumano, menegaskan, Gubernur Kalbar pada saat Paripurna Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2010 sudah menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK tentang permasalahan aset itu juga akan disampaikan ke DPRD. "Saya percaya bahwa hasil pemeriksaan BPK itu akan banyak manfaatnya untuk penataan aset pemprov ke depan. Pembentukan Pansus Aset tujuannya pasti untuk kepentingan penataan aset pemprov Kalbar ke arah lebih baik. Dan ini sejalan dengan keinginan gubernur. Saya pikir tidak masalah jika dibentuk," katanya kepada beberapa waktu lalu. Mengenai audit lanjutan aset pemerintah provinsi yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalbar atas permintaan gubernur itu, Lumano menjelaskan audit aset dari BPK itu belum selesai, dan sedang disusun tim BPK. "Hasil pemeriksaan BPK itu nantinya akan kita sampaikan jika sudah rampung," katanya.

Terpisah, Ketua Fraksi PPP DPRD Kalbar, HM Ali Akbar AS, SH mengatakan, pihaknya menyambut baik sikap Gubernur Kalbar, meminta agar BPK melakukan audit terhadap aset-aset milik Pemerintah Provinsi. Sehingga semua persoalan aset yang selama ini masih terjadi, dan berdampak kepada penilaian BPK atas pengelolaan keuangan daerah bisa terselesaikan.

Dia menegaskan, dari awal pihaknya sangat berkeinginan untuk membenahi aset milik pemerintah provinsi yang selama ini proses penataan, pencatatan dan pengelolaan aset belum terlaksana dengan baik. "Kita mendukung pembentukan Pansus Aset. Dan diharapkan hasil audit BPK itu



HM Ali Akbar. JULIANUS RATNO

ditembuskan ke DPRD Kalbar. Sehingga semua persoalan aset ini menjadi jelas," kata Ali Akbar. Menurut dia, BPN juga punya nadil untuk menyelesaikan aset pemerintah provinsi itu. Dalam hal ini mengenai aset berupa tanah yang belum bersertifikat. Sehingga status aset tersebut menjadi lebih jelas.

Seperti diketahui, hasil audit BPK RI Perwakilan Kalbar ditemukan Rp 1,7 triliun lebih nilai aset yang tak dapat diyakini kewajarannya dari saldo aset tetap Pemprov Kalbar senilai Rp 2,2 triliun lebih berdasarkan laporan yang disajikan per 31 Desember 2010.

Mengenai aset yang masih bermasalah tersebut, terdapat aset tetap tanah seluas 872.682,72 meter persegi atau senilai Rp 41,8 miliar yang belum bersertifikat atas nama Pemprov Kalbar. Aset tanah senilai Rp 14,3 miliar tidak diketahui atau dicatat luasnya. Aset tetap peralatan, mesin, kendaraan roda empat dan roda dua senilai Rp 8,8 miliar tidak informatif dan tidak ada nomor polisinya. Ditambah senilai Rp 3,2 miliar dikuasai pihak lain yang tidak berhak.

Kemudian, tanah seluas

6.045 m² di Jalan Khatulistiwa Siantan sertifikat nomor 660 tahun 1983 atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI di atasnya bangunan gudang buku dan rumah makan yang dikerjasamakan pemanfaatannya dengan pihak ketiga. Dan dua bidang tanah lainnya bernilai Rp 841,3 juta lebih pengkajian datanya tidak andal.

Selain itu, terdapat 12 bidang tanah dan katanya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tapi datanya sulit ditelusuri dan tidak andal. Aset tanah di Jalan Sedau Singkawang seluas 6.669 m² dan seluas 3.319 m² dalam sengketa dengan pihak ketiga. Kemudian, tanah unit TAT di Siantan belum disajikan sebagai aset tetap tanah. Aset tanah seluas 12.826 m² di Gang Kurnia. Di lokasi ini telah berdiri gedung sekolah Yayasan Pendidikan Rahadi Osman berdasarkan SK Gubernur Nomor 247 tahun 1991 tentang penyerahan pengelolaan eks gedung SPMA Jalan Aliyang Pontianak kepada Yayasan Pendidikan Rahadi Osman, tanpa didukung surat perjanjian. Hal ini berorientasi sengketa. Selanjutnya, aset tanah gudang obat Dinas Kesehatan 405 m² di Jalan Kartini dikuasai pihak ketiga sebagai tempat tinggal. Di UPPD Kabupaten Mempawah Dispenda Kalbar melakukan pembelian 1 unit kendaraan roda dua sebesar Rp 25.450.000 merupakan uang bantuan dari Pemkab Pontianak yang tidak disetorkan ke kas daerah dan tidak tercatat dalam APBD Pemprov Kalbar. (jul)